

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pemantauan Harga dan Ketersediaan Stok Kebutuhan barang pokok dan penting di Kutai Barat cenderung stabil dan stok kebutuhan pokok tercukupi. Namun pada minggu ke 3 Bulan Januari terjadi kenaikan harga cabe yang cukup signifikan. Beberapa wilayah di Kaltim termasuk Kutai Barat mengalami kenaikan harga cabe rawit merah yang cukup tinggi mencapai Rp. 120.000/kg. Namun pada minggu ke 4 Bulan Januari harga cabe sudah cenderung turun namun belum stabil. Selain cabe rawit merah, ada ayam ras yang juga mengalami kenaikan walaupun masih cukup aman.

Memasuki Bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri harga Cabe rawit merah mulai mengalami kenaikan lagi namun stok masih aman, ditunjang pula dengan adanya kemandirian masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan akan cabe dengan memanfaatkan tanaman cabe yang ditanam di pekarangan masyarakat sehingga tidak terlalu tergantung dengan cabe yang dijual dipasar. Sampai awal bulan April, bisa dilaporkan stok bahan pokok dan bahan pangan aman menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri

Salah satu tantangan terbesar adalah lonjakan permintaan menjelang Ramadan yang hampir selalu menyebabkan kenaikan harga berbagai komoditas, terutama bahan pangan seperti beras, cabe, telur dll. Data historis menunjukkan bahwa periode ini konsisten menjadi faktor pendorong inflasi/ naiknya harga yang sulit dihindari.

2. Komoditas Pangan sebagai Faktor Dominan Penyebab Inflasi/kenaikan harga

Harga Cabe juga mengalami kenaikan signifikan dalam sebulan terakhir, hal tersebut berimbas kepada pengusaha warung/catering. Sedangkan untuk masyarakat tidak terlalu berdampak karena sudah banyak masyarakat yang menanam tanaman cabe di pekarangan rumahnya

3. Ketergantungan Tinggi terhadap Pasokan dari Luar Daerah

Sebagai daerah yang bukan merupakan sentra produksi, Kabupaten Kutai Barat sangat bergantung kepada pasokan dari luar daerah seperti Samarinda, untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, gula, bawang merah, bawang putih, cabe dan daging ayam ras. Beberapa komoditi tersebut masih disuplay atau dipasok dari daerah lain, terutama Samarinda, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan

4. Distribusi barang mengalami kendala karena akses jalan

Akses jalan yang masih rusak dan parah di wilayah Kecamatan Bongan dan Perbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara, sangat mempengaruhi kelancaran distribusi, terjadinya kerusakan pada banyak titik menyebabkan pergerakan harga menjadi naik karena biaya

angkutan yang lebih besar. Kerusakan disebabkan banyaknya kendaraan pengangkut kelapa sawit dan CPO yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Permasalahan jalan ini sudah seringkali dilaporkan ke Pihak Provinsi maupun Pusat. Pemerintah Kabupaten tidak bisa menganggarkan perbaikan karena status jalan Negara.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan penguatan koordinasi TPID se-Kaltim melalui kegiatan *Capacity Building* dan rapat koordinasi serta *High Level Meeting* (HLM)
2. Kegiatan Pasar Murah menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Paskah telah dan sedang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM yang dimulai pada tanggal 12 Maret sampai dengan 17 April 2025 di 10 (sepuluh) Lokasi/Kampung
3. Kegiatan Gerakan Pangan Murah menjelang Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan di 10 Kecamatan (10 lokasi) yang telah dimulai pada tanggal 11 Maret 2025 dan berakhir pada tanggal 24 Maret 2025 dengan bekerja sama dengan Bulog Samarinda
4. Kegiatan Pemantauan harga dan stok Bahan pokok serta bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian di 16 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan 11 Maret 2025 dengan menggunakan Dana APBD
5. Kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2025 di Ruang Rapat Diklat Lantai 3 Kantor Bupati Kutai Barat dipimpin oleh Bupati Kutai Barat dan didampingi Wakil Bupati Kutai Barat, Kapolres Kutai Barat serta Forkopimda dan Para Kepala OPD anggota TPID
6. Sidak Pasar serta SPBU dilaksanakan pada 20 Maret 2025 di Kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Melak serta Kecamatan Linggang Bigung dalam rangka Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Sidak Pasar dilaksanakan di Kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Linggang Bigung dipimpin Bapak Bupati Kutai Barat dan didampingi Forkopimda serta Para Kepala OPD, serta Sidak Pasar dan SPBU ke Kecamatan Barong Tongkok dan Melak dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati Kutai Barat dan didampingi Forkopimda serta Para Kepala OPD
7. Pengawasan LPG 3 kg dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian di 16 Kecamatan dimulai Bulan Februari 2025
8. Pengawasan distribusi solar bersubsidi dilaksanakan di 16 Kecamatan wilayah Kabupaten Kutai Barat yang terdapat APMS/SPBU di awal Februari 2025

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Keterjangkauan Harga, antara lain :** Percepatan Pembuatan toko penyeimbang (Kios SIGAP), termasuk penggunaan dana BTT untuk upaya pengendalian inflasi, Maksimalkan Operasi Pasar dan/atau Gerakan Pangan Murah untuk komoditas pangan strategis yang memiliki potensi peningkatan tekanan harga, Sidak Pasar dan Distributor khususnya komoditas pangan strategis serta Mendorong penambahan frekuensi penerbangan

Ketersediaan Pasokan, antara lain : Berdayakan BUMD sebagai penyangga pangan

2.

melalui perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah sentra produksi, Penyaluran bantuan alsintan dll, Menggalakkan program tanam di pekarangan, Penyediaan/pemanfaatan *cold storage* untuk produk hortikultura serta Meningkatkan pengadaan cadangan pangan pemerintah

3. **Kelancaran Distribusi, antara lain :** Subsidi ongkos angkut untuk penyediaan bahan pokok penting, Penguatan dan pemantauan kuota BBM di SPBU, khususnya solar untuk angkutan umum, Penyiapan pergudangan dan *distribution centres* serta sistem informasi keluar masuk logistik barang di pasar induk
4. **Komunikasi yang Efektif, antara lain :** Himbauan belanja bijak dan tidak *panic buying* kepada masyarakat termasuk program Ulama Peduli Inflasi, Diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal, Sosialisasi produk turunan cabai rawit

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan masing-masing OPD melalui *high level meeting* untuk menyusun strategi pengendalian inflasi daerah.
2. Penguatan kelembagaan TPID dengan melaksanakan *Capacity Building*/studi tiru ke Daerah Produsen/ champion
3. Memanfaatkan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi, termasuk mendorong pembentukan kios penyeimbang di kabupaten Kutai Barat
4. Fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas dan pembangunan sarana pangan untuk komoditas pokok dan penyumbang inflasi tinggi.
5. Meningkatkan seruan konsumsi secara wajar dengan bijak berbelanja, serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui publikasi informasi yang benar mengenai harga dan ketersediaan pangan.